



**MENTERI
PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA
DAN REFORMASI BIROKRASI
REPUBLIK INDONESIA**

KEPUTUSAN MENTERI PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA
DAN REFORMASI BIROKRASI REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 1035 TAHUN 2022
TENTANG
HASIL PEMANTAUAN DAN EVALUASI KINERJA PENYELENGGARAAN
PELAYANAN PUBLIK DI KEMENTERIAN, LEMBAGA, DAN PEMERINTAH DAERAH
TAHUN 2022

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA
DAN REFORMASI BIROKRASI REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa untuk menindaklanjuti pelaksanaan kegiatan pemantauan dan evaluasi penyelenggaraan pelayanan publik pada unit penyelenggaraan pelayanan publik lingkup kementerian, lembaga dan pemerintah daerah tahun 2022, perlu menetapkan hasil pemantauan dan evaluasi kegiatan dimaksud;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi tentang Hasil Pemantauan dan Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pelayanan Publik di Kementerian, Lembaga dan Pemerintah Daerah Tahun 2022;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Republik Indonesia

Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 215, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5357);

3. Peraturan Presiden Nomor 47 Tahun 2021 tentang Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 126);
4. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 29 Tahun 2022 tentang Pemantauan dan Evaluasi Kinerja Unit Penyelenggaraan Pelayanan Publik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 672);
5. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 60 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1249); sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 39 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 60 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 753);
6. Pedoman Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 1 Tahun 2022 tentang Instrumen dan Mekanisme Pemantauan dan Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pelayanan Publik;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN MENTERI PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA DAN REFORMASI BIROKRASI TENTANG HASIL PEMANTAUAN DAN EVALUASI KINERJA PENYELENGGARAAN PELAYANAN PUBLIK DI KEMENTERIAN, LEMBAGA DAN PEMERINTAH DAERAH TAHUN 2022.
- KESATU : Menetapkan Hasil Pemantauan dan Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pelayanan Publik di Kementerian, Lembaga dan Pemerintah Daerah Tahun 2022 sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Menteri ini.
- KEDUA : Hasil Pemantauan dan Evaluasi sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU telah melalui proses pengolahan, validasi, dan penentuan akhir oleh Tim Evaluator.
- KETIGA : Keputusan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 5 Desember 2022

MENTERI PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA
DAN REFORMASI BIROKRASI
REPUBLIK INDONESIA,

ttd

ABDULLAH AZWAR ANAS

Salinan Sesuai Dengan Aslinya

KEMENTERIAN PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA

DAN REFORMASI BIROKRASI

Kepala Biro Sumber Daya Manusia, Organisasi dan Hukum



Shi Rejeki Nawangsasih

LAMPIRAN KEPUTUSAN MENTERI
 PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA DAN
 REFORMASI BIROKRASI
 NOMOR 1035 TAHUN
 TENTANG
 HASIL PEMANTAUAN DAN EVALUASI
 KINERJA PENYELENGGARAAN PELAYANAN
 PUBLIK DI KEMENTERIAN, LEMBAGA DAN
 PEMERINTAH DAERAH TAHUN 2022

HASIL PEMANTAUAN DAN EVALUASI KINERJA PENYELENGGARAAN
 PELAYANAN PUBLIK DI KEMENTERIAN, LEMBAGA,
 DAN PEMERINTAH DAERAH TAHUN 2022

A. KEMENTERIAN/LEMBAGA

NO.	KEMENTERIAN/ LEMBAGA	UNIT PELAYANAN PUBLIK	INDEKS	KATEGORI
1.	Badan Pusat Statistik	Pelayanan Statistik Terpadu, Badan Pusat Statistik Provinsi Sumatera Selatan	4,75	A
2.	Kementerian Komunikasi dan Informatika	Pelayanan Perizinan Penyelenggaraan Telekomunikasi, Direktorat Telekomunikasi	4,62	A
3.	Kementerian Kelautan dan Perikanan	Balai Besar Karantina Ikan, Pengendalian Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan Makassar	4,58	A
4.	Kementerian Perindustrian	Balai Besar Standardisasi dan Pelayanan Jasa Pencegahan Pencemaran Industri Semarang	4,58	A
5.	Badan Narkotika Nasional	Balai Rehabilitasi Tanah Merah di Provinsi Kalimantan Timur	4,57	A
6.	Badan Pengawas Obat dan Makanan	Balai Besar POM di Yogyakarta	4,56	A
7.	Lembaga Administrasi Negara	Politeknik Sekolah Tinggi Ilmu Administrasi, Lembaga Administrasi Negara Bandung	4,56	A
8.	Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral	Perizinan Ketenagalistrikan dan Pengaduan konsumen listrik, Direktorat Jenderal Ketenagalistrikan	4,56	A
9.	Kementerian Agama	Pelayanan Terpadu Kantor Kabupaten Bantul	4,56	A
10.	Kementerian Perhubungan	Pelayanan Jasa Transportasi, Balai Pengelola Kereta Api Ringan Sumatera Selatan	4,55	A

NO.	KEMENTERIAN/ LEMBAGA	UNIT PELAYANAN PUBLIK	INDEKS	KATEGORI
11.	Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif	Biro Komunikasi	4,54	A
12.	Kementerian Perdagangan	Direktorat Standardisasi dan Pengendalian Mutu	4,54	A
13.	Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan (BASARNAS)	Pembinaan Potensi Pencarian dan Pertolongan, Deputi Bidang Pembinaan Tenaga dan Potensi Pencarian Pertolongan	4,53	A
14.	Kementerian Pertanian	Pusat Perlindungan Varietas Tanaman dan Perizinan Pertanian	4,53	A
15.	Mahkamah Konstitusi	Pusat Teknologi Informasi dan Komunikasi	4,53	A
16.	Kementerian Keuangan	Unit Lokus Tertentu pada 34 Provinsi di Indonesia	4,53	A
17.	Badan Riset dan Inovasi Nasional	Pengujian, Analisis Pengukuran, Kalibrasi Pembinaan, Magang dan Sewa, Direktorat Pengelolaan Laboratorium, Fasilitas Riset, dan Kawasan Sains dan Teknologi	4,52	A
18.	Perpustakaan Nasional	Pusat Jasa Informasi Perpustakaan dan Pengelolaan Naskah Nusantara	4,51	A
19.	Badan Kepegawaian Negara	Pembinaan dan Penyelenggaraan Manajemen ASN di Wilayah Kerja Kantor Regional Regional X BKN Denpasar	4,51	A
20.	Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi	Deputi Bidang Pelayanan Publik	4,51	A
21.	Kementerian Luar Negeri	Museum Konferensi Asia Afrika	4,51	A
22.	Badan Informasi Geospasial	Pelayanan Terpadu Informasi Geospasial, Balai Layanan Jasa dan Produk Geospasial	4,49	A-
23.	Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat	Balai Teknologi Air Minum	4,46	A-
24.	Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan	Layanan Informasi Publik (PPID), Biro Hukum, Persidangan, dan Hubungan Masyarakat	4,42	A-
25.	Kementerian Kesehatan	Rumah Sakit Umum Pusat Nasional Dr. Cipto Mangunkusumo	4,41	A-

NO.	KEMENTERIAN/ LEMBAGA	UNIT PELAYANAN PUBLIK	INDEKS	KATEGORI
26.	Kementerian Ketenagakerjaan	Layanan Pelatihan, Pembinaan, dan Pengembangan Tenaga Kerja Pusat Pengembangan Sumber Daya Manusia Ketenagakerjaan Jakarta	4,36	A-
27.	Lembaga Ketahanan Nasional	Layanan Pemantapan Nilai-Nilai Kebangsaan, Deputi Bidang Pemantapan Nilai-Nilai Kebangsaan	4,35	A-
28.	Pusat Pelaporan Analisis Transaksi Keuangan	Pusat Pendidikan dan Pelatihan Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme	4,35	A-
29.	Badan Pengawas Tenaga Nuklir	Direktorat Perizinan Fasilitas Radiasi dan Zat Radioaktif	4,34	A-
30.	Kementerian Sekretariat Negara	Pelayanan Penanganan Administrasi Pengangkatan/ Pemberhentian Pejabat Negara dan Pejabat Lainnya, Biro Administrasi Pejabat Negara	4,34	A-
31.	Komisi Pemilihan Umum	Layanan Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan, Komisi Pemilihan Umum Provinsi Jawa Timur	4,34	A-
32.	Badan Pengusahaan Batam	Layanan Kepelabuhanan	4,33	A-
33.	Sekretariat Jenderal Dewan Perwakilan Rakyat RI	Layanan Dukungan Persidangan Kepada Dewan, Deputi Bidang Persidangan	4,31	A-
34.	Kementerian Koordinator Bidang Kematriman dan Investasi	Penyediaan Data dan Informasi Publik, Sekretariat Kementerian Koordinator Bidang Kematriman dan Investasi	4,3	A-
35.	Ombudsman RI	Keasistenan Utama Pengaduan Masyarakat	4,28	A-
36.	Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah	Pelayanan Pengembangan Kapasitas Pelaku Usaha dalam Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (PBJP)	4,25	A-
37.	Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan	Perwakilan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Provinsi Nusa Tenggara Barat	4,24	A-
38.	Badan Intelijen Negara	Deputi Komunikasi dan Informasi	4,18	A-
39.	Badan Siber dan Sandi Negara	Layanan GoV- CISRT Direktorat Operasi Keamanan Siber	4,13	A-

NO.	KEMENTERIAN/ LEMBAGA	UNIT PELAYANAN PUBLIK	INDEKS	KATEGORI
40.	Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan	Layanan Konsultasi dan Audiensi, Deputy Bidang Koordinasi Peningkatan Kualitas Pendidikan dan Moderasi Beragama	4,13	A-
41.	Badan Nasional Penanggulangan Bencana	Pusat Pendidikan dan Pelatihan Penanggulangan Bencana	4,12	A-
42.	Kementerian Pertahanan	Pelayanan Perizinan Ekspor/Impor Alpalhankam	4,09	A-
43.	Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Bappenas	Pusat Pembinaan, Pendidikan dan Pelatihan Perencana	4,07	A-
44.	Kementerian Dalam Negeri	Penyelenggaraan Perguruan Tinggi Kedinasan, Institut Pemerintahan Dalam Negeri	4,06	A-
45.	Kementerian Sosial	Sentra Terpadu "Pangudi Luhur" di Bekasi	4,05	A-
46.	Badan Pemeriksa Keuangan	Layanan Komunikasi Stakeholder dan Pengaduan, BPK Provinsi Jawa Timur	4,04	A-
47.	Komisi Pemberantasan Korupsi	Layanan Pelaporan Gratifikasi, Direktorat Gratifikasi dan Pelayanan Publik	4,03	A-
48.	Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban	Biro Penelaahan Permohonan	4,03	A-
49.	Komisi Yudisial	Biro Pengawasan Perilaku Hakim	4,02	A-
50.	Badan Nasional Pengelola Perbatasan	Pos Lintas Batas Negara (PLBN) Entikong	4,01	A-
51.	Badan Perlindungan Pekerja Migran Indonesia	Perlindungan dan Penempatan Pekerja Migran, Balai Pelayanan Perlindungan Pekerja Migran Indonesia Jawa Tengah	4,01	A-
52.	Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi	Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi Wilayah VI Jawa Tengah	4,01	A-
53.	Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	Layanan Penanganan Korban Kekerasan Pada Perempuan, Deputy Bidang Perlindungan Hak Perempuan	4,01	A-
54.	Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional	Pusat Pelayanan Keluarga Sejahtera, Direktorat Bina Ketahanan Keluarga Lansia dan Rentan BKKBN Pusat Jakarta	4	B

NO.	KEMENTERIAN/ LEMBAGA	UNIT PELAYANAN PUBLIK	INDEKS	KATEGORI
55.	Badan Nasional Penanggulangan Terorisme	Layanan Kunjungan Keluarga di Lapas Khusus Terorisme, Direktorat Deradikalisasi	3,99	B
56.	Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan	Direktorat Jenderal Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan, Balai Pemantapan Kawasan Hutan dan Tata Lingkungan (BPKHTL) Wilayah XI Yogyakarta	3,92	B
57.	Kementerian Investasi/Badan Koordinasi Penanaman Modal	Direktorat Pelayanan Perizinan Berusaha	3,91	B
58.	Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian	Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Utama	3,91	B
59.	Tentara Nasional Indonesia (TNI)	Lembaga Pendidikan Militer, Akademi Angkatan Udara (AAU) TNI Angkatan Udara (4,05/A-)	3,91	B
		Pusat Kesenjataan Artileri Pertahanan Udara (Pussenarhanud) Kodiklatad TNI Angkatan Darat (4,54/A)		
		Keamanan Wilayah Alur Laut Kepulauan Indonesia II, Komando Armada II TNI Angkatan Laut (3,14/B-).		
60.	Komisi Aparatur Sipil Negara	Kelompok Kerja Pengawasan Bidang Penerapan Nilai Dasar, Kode Etik, Kode Perilaku, dan Netralitas ASN	3,88	B
61.	Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia	Unit Lokus Tertentu pada 34 Provinsi di Indonesia	3,9	B
62.	Mahkamah Agung	Unit Lokus Tertentu pada 34 Provinsi di Indonesia	3,87	B
63.	Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah	Layanan Pengelola Dana Bergulir koperasi dan UMKM	3,85	B
64.	Kementerian Pemuda dan Olahraga	Layanan Kepemudaan, Pusat Pemberdayaan Pemuda dan Olahraga Nasional (PPPON)	3,85	B
65.	Komisi Nasional Hak Asasi Manusia	Layanan Penerimaan Pengaduan dan Penanganan Kasus Hak Asasi Manusia, Biro Dukungan Penegakan Hak Asasi Manusia	3,82	B
66.	Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia	Direktorat Layanan dan Pengembangan Usaha	3,8	B
67.	Arsip Nasional Republik Indonesia	Pusat Jasa Kearsipan	3,78	B
68.	Kementerian Desa, Pembangunan	Layanan Perizinan IPT Direktorat Pelayanan Investasi	3,78	B

NO.	KEMENTERIAN/ LEMBAGA	UNIT PELAYANAN PUBLIK	INDEKS	KATEGORI
	Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi	Desa, Daerah Tertinggal dan Transmigrasi		
69.	Kementerian Agraria dan Tata Ruang/ BPN*	Unit Lokus Tertentu pada 33 Provinsi di Indonesia	3,78	B
70.	Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika	Layanan Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika, Stasiun Geofisika Kelas I Bandung	3,76	B
71.	Kementerian Badan Usaha Milik Negara	Asisten Deputi Bidang Industri Kesehatan	3,69	B
72.	Kepolisian Republik Indonesia	332 Polres/Polresta/ Polrestabes/Polres Metro	3,88	B
73.	Badan Pembinaan Ideologi Pancasila	Layanan Pembentukan Pasukan Pengibar Bendera Pusaka	3,64	B
74.	Badan Standarisasi Nasional	Layanan Kalibrasi	3,62	B
75.	Sekretariat Jenderal Dewan Perwakilan Daerah RI	Layanan PPID, Biro Protokol, Hubungan Masyarakat, dan Media	3,59	B
76.	Badan Koordinator Keamanan Laut	Layanan Pembinaan Masyarakat Maritim Direktorat Kerjasama	3,56	B
77.	Televisi Republik Indonesia	Layanan Pengaduan Kualitas dan Isi Siaran Program dan Berita, Direktorat Program Dan Berita	3,48	B-
78.	Kejaksaan Agung	Unit Lokus Tertentu pada 34 Provinsi di Indonesia	3,46	B-
79.	Dewan Ketahanan Nasional	Biro Persidangan, Sistem Informasi dan Pengawasan Internal	3,44	B-
80.	Sekretariat Jenderal Majelis Permusyawaratan Rakyat RI	Layanan Informasi Publik Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi MPR RI, Biro Hubungan Masyarakat dan Sistem Informasi	3,24	B-
81.	Badan Pengawasan Pemilihan Umum	Biro Fasilitasi Penyelesaian Sengketa Proses Pemilu	3	C

B. LIMA KEMENTERIAN/LEMBAGA KHUSUS

No	Provinsi	Kejaksaan Agung		Kementerian Keuangan		Kementerian Hukum dan HAM		Kementerian ATR/BPN		Mahkamah Agung	
		Indeks	Kategori	Indeks	Kategori	Indeks	Kategori	Indeks	Kategori	Indeks	Kategori
1	Provinsi Aceh	3,54	B	4,35	A-	4	B	3,87	B	3,93	B
2	Provinsi Bali	3,72	B	4,74	A	4,02	A-	4,48	A-	3,95	B
3	Provinsi Bangka Belitung	3,4	B-	4,59	A	4,55	A	3,82	B	3,58	B
4	Provinsi Banten	3,03	B-	4,65	A	3,73	B	3,56	B	3,64	B
5	Provinsi Bengkulu	4,3	A-	4,44	A-	2,79	C	3,63	B	3,51	B
6	Provinsi DIY	3,24	B-	4,77	A	4,69	A	4,48	A-	4,36	A-
7	Provinsi DKI Jakarta	3,84	B	4,75	A	4,45	A-	4,18	A-	4,3	A-
8	Provinsi Gorontalo	3,46	B-	4,58	A	3,98	B	4,01	A-	4,18	A-
9	Provinsi Jambi	3,15	B-	4,39	A-	4,02	A-	3,58	B	4,6	A
10	Provinsi Jawa Barat	3,63	B	4,38	A-	4,62	A	4,13	A-	4,04	A-
11	Provinsi Jawa Tengah	3,32	B-	4,69	A	4,19	A-	3,29	B-	2,87	C
12	Provinsi Jawa Timur	3,8	B	4,5	A-	3,67	B	3,82	B	4,57	A
13	Provinsi Kalimantan Barat	3,06	B-	4,58	A	3,04	B-	4,33	A-	3,16	B-
14	Provinsi Kalimantan Selatan	2,49	C-	4,76	A	3,72	B	4,45	A-	4,68	A
15	Provinsi Kalimantan Tengah	3,07	B-	4,8	A	3,68	B	4,36	A-	2,98	C
16	Provinsi Kalimantan Timur	3,06	B-	4,76	A	3,92	B	3,53	B	4,36	A-
17	Provinsi Kalimantan Utara	3,1	B-	4,51	A	3,99	B	3,2	B-	4,42	A-
18	Provinsi Kepulauan Riau	4,68	A	4,21	A-	4,51	A	4,35	A-	3,36	B-
19	Provinsi Lampung	3,73	B	4,22	A-	3,77	B	3,87	B	3,57	B
20	Provinsi Maluku	3,54	B	4,12	A-	3,68	B	3,44	B-	3,89	B
21	Provinsi Maluku Utara	2,63	C	4,78	A	3,51	B	4,29	A-	4,12	A-
22	Provinsi Nusa Tenggara Barat	3,99	B	4,57	A	3,52	B	3,53	B	4,47	A-

No	Provinsi	Kejaksaan Agung		Kementerian Keuangan		Kementerian Hukum dan HAM		Kementerian ATR/BPN		Mahkamah Agung	
		Indeks	Kategori	Indeks	Kategori	Indeks	Kategori	Indeks	Kategori	Indeks	Kategori
23	Provinsi Nusa Tenggara Timur	3,32	B-	4,68	A	3,6	B	3,21	B-	4,65	A
24	Provinsi Papua	4,01	A-	4,32	A-	4,03	A-	3,2	B-	3,05	B-
25	Provinsi Papua Barat	3,65	B	4,21	A-	3,81	B	2,99	C	3,07	B-
26	Provinsi Riau	3,8	B	4,52	A	2,31	C-	4,62	A	4,24	A-
27	Provinsi Sulawesi Barat	3,66	B	4,21	A-	3,58	B			3,76	B
28	Provinsi Sulawesi Selatan	3,61	B	4,63	A	3,91	B	3,37	B-	4,27	A-
29	Provinsi Sulawesi Tengah	2,93	C	4,79	A	4,51	A	3,22	B-	4,17	A-
30	Provinsi Sulawesi Tenggara	3,25	B-	4,7	A	3,85	B	3,06	B-	3,45	B-
31	Provinsi Sulawesi Utara	3,6	B	4,47	A-	4,07	A-	3,23	B-	3,41	B-
32	Provinsi Sumatera Barat	3,09	B-	4,15	A-	4,52	A	3,48	B-	3,84	B
33	Provinsi Sumatera Selatan	3,59	B	4,75	A	3,74	B	3,61	B	3,52	B
34	Provinsi Sumatera Utara	3,4	B-	4,4	A-	4,52	A	4,51	A	3,69	B

C. DPM-PTSP PROVINSI

No	DPMP TSP Provinsi	Indeks	Kategori
1.	Provinsi Jawa Barat	4,64	A
2.	Provinsi DKI Jakarta	4,63	A
3.	Provinsi DIY	4,59	A
4.	Provinsi Jawa Tengah	4,56	A
5.	Provinsi Bali	4,54	A
6.	Provinsi Riau	4,53	A
7.	Provinsi Gorontalo	4,52	A
8.	Provinsi Kalimantan Selatan	4,51	A
9.	Provinsi Jawa Timur	4,51	A
10.	Provinsi Sumatera Selatan	4,48	A-
11.	Provinsi Kalimantan Barat	4,46	A-
12.	Provinsi Sulawesi Tenggara	4,45	A-
13.	Provinsi Sulawesi Selatan	4,44	A-
14.	Provinsi Bangka Belitung	4,4	A-
15.	Provinsi Banten	4,36	A-
16.	Provinsi Maluku Utara	4,26	A-
17.	Provinsi Bengkulu	4,23	A-
18.	Provinsi Kepulauan Riau	4,19	A-
19.	Provinsi Lampung	4,11	A-
20.	Provinsi Sulawesi Tengah	4,08	A-
21.	Provinsi Kalimantan Utara	4,06	A-
22.	Provinsi Sumatera Utara	4,03	A-
23.	Provinsi Maluku	4,03	A-
24.	Provinsi Aceh	4,01	A-
25.	Provinsi Kalimantan Tengah	3,96	B
26.	Provinsi Sumatera Barat	3,93	B
27.	Provinsi Sulawesi Utara	3,93	B
28.	Provinsi Nusa Tenggara Barat	3,9	B
29.	Provinsi Sulawesi Barat	3,83	B
30.	Provinsi Jambi	3,7	B
31.	Provinsi Kalimantan Timur	3,53	B
32.	Provinsi Papua Barat	3,32	B-
33.	Provinsi Papua	3,27	B-
34.	Provinsi Nusa Tenggara Timur	3,04	B-

D. SISTEM MANUNGGAL SATU ATAP/SAMSAT PROVINSI

No	Samsat Provinsi	Indeks	Kategori
1.	Provinsi Jawa Timur	4,65	A
2.	Provinsi DIY	4,62	A
3.	Provinsi Jawa Barat	4,59	A
4.	Provinsi Sumatera Selatan	4,58	A
5.	Provinsi Bengkulu	4,57	A
6.	Provinsi Papua Barat	4,52	A
7.	Provinsi Jawa Tengah	4,51	A
8.	Provinsi Lampung	4,50	A-
9.	Provinsi Kepulauan Riau	4,49	A-
10.	Provinsi Bangka Belitung	4,49	A-
11.	Provinsi Kalimantan Timur	4,47	A-
12.	Provinsi Jambi	4,38	A-
13.	Provinsi Kalimantan Barat	4,38	A-
14.	Provinsi Sulawesi Utara	4,35	A-
15.	Provinsi Sulawesi Selatan	4,24	A-
16.	Provinsi Sulawesi Tenggara	4,21	A-
17.	Provinsi DKI Jakarta	4,16	A-
18.	Provinsi Gorontalo	4,15	A-
19.	Provinsi Maluku Utara	4,11	A-
20.	Provinsi Kalimantan Selatan	4,02	A-
21.	Provinsi Aceh	4,01	A-
22.	Provinsi Sumatera Utara	3,96	B
23.	Provinsi Maluku	3,78	B
24.	Provinsi Sumatera Barat	3,74	B
25.	Provinsi Banten	3,61	B
26.	Provinsi Kalimantan Utara	3,54	B
27.	Provinsi Nusa Tenggara Barat	3,52	B
28.	Provinsi Bali	3,45	B-
29.	Provinsi Papua	3,22	B-
30.	Provinsi Sulawesi Barat	3,14	B-
31.	Provinsi Kalimantan Tengah	3,01	B-
32.	Provinsi Sulawesi Tengah	2,99	C
33.	Provinsi Riau	2,88	C
34.	Provinsi Nusa Tenggara Timur	2,58	C

E. DPM-PTSP KABUPATEN/KOTA

No	DPM-PTSP KAB/KOTA	Indeks	Kategori
1	Kota Pekanbaru	4,75	A
2	Kota Palembang	4,74	A
3	Kabupaten Banyuwangi	4,73	A
4	Kabupaten Pandeglang	4,72	A
5	Kabupaten Badung	4,71	A
6	Kota Bogor	4,68	A
7	Kabupaten Tabalong	4,68	A
8	Kabupaten Madiun	4,67	A
9	Kabupaten Probolinggo	4,67	A
10	Kabupaten Kulonprogo	4,67	A
11	Kabupaten Sleman	4,67	A
12	Kota Bandung	4,66	A
13	Kabupaten Bandung	4,66	A
14	Kabupaten Sumedang	4,66	A
15	Kota Banjarbaru	4,66	A
16	Kabupaten Banyumas	4,66	A
17	Kota Surakarta	4,66	A
18	Kabupaten Kutai Kartanegara	4,65	A
19	Kota Denpasar	4,64	A
20	Kabupaten Gunung Kidul	4,64	A
21	Kota Kendari	4,63	A
22	Kota Bekasi	4,62	A
23	Kabupaten Bantul	4,62	A
24	Kabupaten Bone Bolango	4,62	A
25	Kabupaten Kendal	4,61	A
26	Kota Banda Aceh	4,6	A
27	Kabupaten Hulu Sungai Selatan	4,6	A
28	Kota Bandar Lampung	4,59	A

No	DPM-PTSP KAB/KOTA	Indeks	Kategori
29	Kota Metro	4,59	A
30	Kabupaten Tulang Bawang	4,59	A
31	Kabupaten Magetan	4,59	A
32	Kabupaten Jepara	4,59	A
33	Kota Semarang	4,59	A
34	Kota Payakumbuh	4,58	A
35	Kota Tangerang Selatan	4,58	A
36	Kabupaten Gresik	4,58	A
37	Kota Bukittinggi	4,57	A
38	Kota Surabaya	4,57	A
39	Kabupaten Sidoarjo	4,57	A
40	Kota Yogyakarta	4,57	A
41	Kabupaten Padang Pariaman	4,56	A
42	Kabupaten Siak	4,56	A
43	Kota Tanjungpinang	4,56	A
44	Kabupaten Tuban	4,56	A
45	Kota Salatiga	4,56	A
46	Kabupaten Bekasi	4,55	A
47	Kabupaten Purwakarta	4,55	A
48	Kabupaten Gianyar	4,55	A
49	Kabupaten Kebumen	4,55	A
50	Kabupaten Bantaeng	4,55	A
51	Kota Jambi	4,54	A
52	Kabupaten Lamongan	4,54	A
53	Kota Samarinda	4,54	A
54	Kota Manado	4,54	A
55	Kabupaten Pinrang	4,54	A
56	Kota Tebing Tinggi	4,53	A

No	DPM-PTSP KAB/KOTA	Indeks	Kategori
57	Kota Batam	4,53	A
58	Kabupaten Banyuasin	4,53	A
59	Kabupaten Karawang	4,53	A
60	Kota Mojokerto	4,53	A
61	Kota Singkawang	4,53	A
62	Kota Balikpapan	4,53	A
63	Kabupaten Cilacap	4,53	A
64	Kabupaten Batang	4,53	A
65	Kabupaten Karanganyar	4,53	A
66	Kabupaten Pati	4,53	A
67	Kabupaten Barru	4,53	A
68	Kota Sawahlunto	4,52	A
69	Kabupaten Musi Banyuasin	4,52	A
70	Kota Tasikmalaya	4,52	A
71	Kabupaten Bojonegoro	4,52	A
72	Kabupaten Tanah Laut	4,52	A
73	Kabupaten Blora	4,52	A
74	Kabupaten Sukoharjo	4,52	A
75	Kota Cimahi	4,52	A
76	Kota Pariaman	4,51	A
77	Kabupaten Bandung Barat	4,51	A
78	Kabupaten Sanggau	4,51	A
79	Kota Banjarmasin	4,51	A
80	Kabupaten Barito Kuala	4,51	A
81	Kabupaten Belu	4,51	A
82	Kabupaten Purbalingga	4,51	A
83	Kabupaten Wonogiri	4,51	A
84	Kota Magelang	4,51	A

No	DPM-PTSP KAB/KOTA	Indeks	Kategori
85	Kabupaten Purworejo	4,51	A
86	Kota Palu	4,51	A
87	Kabupaten Maros	4,51	A
88	Kota Pare-Pare	4,51	A
89	Kabupaten Kepulauan Selayar	4,51	A
90	Kabupaten Boyolali	4,5	A-
91	Kota Bengkulu	4,49	A-
92	Kabupaten Buleleng	4,48	A-
93	Kota Administrasi Jakarta Selatan	4,47	A-
94	Kota Blitar	4,47	A-
95	Kota Probolinggo	4,47	A-
96	Kabupaten Temanggung	4,46	A-
97	Kabupaten Kuningan	4,45	A-
98	Kota Tangerang	4,45	A-
99	Kabupaten Seruyan	4,45	A-
100	Kota Tegal	4,45	A-
101	Kota Solok	4,44	A-
102	Kota Pontianak	4,44	A-
103	Kabupaten Grobogan	4,44	A-
104	Kota Malang	4,42	A-
105	Kabupaten Klungkung	4,42	A-
106	Kabupaten Klaten	4,42	A-
107	Kota Padang	4,41	A-
108	Kabupaten Karangasem	4,41	A-
109	Kota Lubuklinggau	4,4	A-
110	Kota Palopo	4,4	A-
111	Kota Administrasi Jakarta Utara	4,4	A-
112	Kabupaten Cianjur	4,39	A-

No	DPM-PTSP KAB/KOTA	Indeks	Kategori
113	Kota Padang Panjang	4,38	A-
114	Kabupaten Bombana	4,37	A-
115	Kabupaten Lampung Utara	4,37	A-
116	Kabupaten Malang	4,37	A-
117	Kota Batu	4,37	A-
118	Kabupaten Bangka Tengah	4,36	A-
119	Kabupaten Bogor	4,35	A-
120	Kota Madiun	4,35	A-
121	Kota Tomohon	4,34	A-
122	Kabupaten Semarang	4,34	A-
123	Kabupaten Merauke	4,34	A-
124	Kabupaten Natuna	4,33	A-
125	Kabupaten Ngawi	4,32	A-
126	Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur	4,31	A-
127	Kabupaten Garut	4,3	A-
128	Kabupaten Hulu Sungai Tengah	4,3	A-
129	Kota Pekalongan	4,29	A-
130	Kabupaten Brebes	4,29	A-
131	Kabupaten Kotawaringin Barat	4,27	A-
132	Kabupaten Sukabumi	4,26	A-
133	Kabupaten Trenggalek	4,26	A-
134	Kabupaten Sintang	4,26	A-
135	Kabupaten Pesawaran	4,25	A-
136	Kota Administrasi Jakarta Timur	4,25	A-
137	Kabupaten Pulang Pisau	4,25	A-
138	Kabupaten Banjar	4,25	A-
139	Kabupaten Serang	4,24	A-
140	Kabupaten Kotabaru	4,24	A-

No	DPM-PTSP KAB/KOTA	Indeks	Kategori
141	Kabupaten Pekalongan	4,23	A-
142	Kabupaten Tanah Datar	4,22	A-
143	Kabupaten Bintan	4,22	A-
144	Kota Depok	4,22	A-
145	Kabupaten Tulungagung	4,22	A-
146	Kota Administrasi Jakarta Barat	4,2	A-
147	Kota Bontang	4,2	A-
148	Kabupaten Tabanan	4,2	A-
149	Kota Bitung	4,19	A-
150	Kota Prabumulih	4,18	A-
151	Kabupaten Lebak	4,18	A-
152	Kota Cilegon	4,17	A-
153	Kabupaten Lampung Barat	4,17	A-
154	Kabupaten Jombang	4,17	A-
155	Kabupaten Lampung Tengah	4,16	A-
156	Kota Gorontalo	4,16	A-
157	Kota Ternate	4,16	A-
158	Kabupaten Gorontalo	4,14	A-
159	Kabupaten Kayong Utara	4,13	A-
160	Kabupaten Gowa	4,13	A-
161	Kabupaten Tanjung Jabung Barat	4,12	A-
162	Kabupaten Pematang	4,12	A-
163	Kabupaten Gorontalo Utara	4,1	A-
164	Kabupaten Kediri	4,09	A-
165	Kota Kediri	4,09	A-
166	Kabupaten Kubu Raya	4,09	A-
167	Kabupaten Jember	4,09	A-
168	Kabupaten Konawe Selatan	4,09	A-

No	DPM-PTSP KAB/KOTA	Indeks	Kategori
169	Kabupaten Karimun	4,08	A-
170	Kabupaten Bondowoso	4,08	A-
171	Kota Sukabumi	4,05	A-
172	Kota Mataram	4,05	A-
173	Kabupaten Tegal	4,04	A-
174	Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu	4,04	A-
175	Kabupaten Deli Serdang	4,03	A-
176	Kota Baubau	4,03	A-
177	Kabupaten Indragiri Hilir	4,02	A-
178	Kabupaten Musi Rawas	4,02	A-
179	Kota Pasuruan	4,02	A-
180	Kabupaten Murung Raya	4,02	A-
181	Kabupaten Sinjai	4,02	A-
182	Kota Makassar	4,02	A-
183	Kabupaten Batanghari	4,01	A-
184	Kabupaten Ogan Ilir	4,01	A-
185	Kabupaten Halmahera Utara	4,01	A-
186	Kabupaten Bengkulu Selatan	4	B
187	Kabupaten Empat Lawang	4	B
188	Kabupaten Blitar	4	B
189	Kabupaten Sekadau	4	B
190	Kota Tarakan	4	B
191	Kabupaten Kudus	4	B
192	Kabupaten Mamuju	4	B
193	Kabupaten Bireuen	3,99	B
194	Kabupaten Agam	3,99	B
195	Kabupaten Tanah Bumbu	3,99	B
196	Kabupaten Pohuwato	3,99	B

No	DPM-PTSP KAB/KOTA	Indeks	Kategori
197	Kabupaten Muara Enim	3,98	B
198	Kabupaten Pacitan	3,98	B
199	Kabupaten Tapin	3,98	B
200	Kabupaten Ogan Komering Ulu	3,97	B
201	Kabupaten Tanggamus	3,97	B
202	Kabupaten Pasuruan	3,97	B
203	Kota Bima	3,97	B
204	Kabupaten Banjarnegara	3,97	B
205	Kabupaten Pasaman	3,96	B
206	Kabupaten Lampung Selatan	3,96	B
207	Kabupaten Kapuas	3,96	B
208	Kabupaten Dompu	3,96	B
209	Kabupaten Tasikmalaya	3,95	B
210	Kabupaten Tulang Bawang Barat	3,95	B
211	Kabupaten Magelang	3,95	B
212	Kabupaten Lingga	3,94	B
213	Kabupaten Kepulauan Anambas	3,94	B
214	Kabupaten Demak	3,94	B
215	Kabupaten Aceh Besar	3,93	B
216	Kabupaten Asahan	3,93	B
217	Kota Administrasi Jakarta Pusat	3,93	B
218	Kabupaten Ketapang	3,93	B
219	Kabupaten Indragiri Hulu	3,92	B
220	Kabupaten Tangerang	3,92	B
221	Kota Medan	3,91	B
222	Kabupaten Dharmasraya	3,91	B
223	Kabupaten Sragen	3,89	B
224	Kabupaten Solok Selatan	3,88	B

No	DPM-PTSP KAB/KOTA	Indeks	Kategori
225	Kota Banjar	3,88	B
226	Kabupaten Kampar	3,87	B
227	Kabupaten Majalengka	3,87	B
228	Kabupaten Aceh Barat	3,86	B
229	Kabupaten Bangka	3,85	B
230	Kabupaten Polewali Mandar	3,85	B
231	Kabupaten Karo	3,84	B
232	Kabupaten Way Kanan	3,84	B
233	Kabupaten Manokwari	3,84	B
234	Kabupaten Aceh Tengah	3,83	B
235	Kabupaten Solok	3,83	B
236	Kabupaten Sampang	3,82	B
237	Kabupaten Mempawah	3,82	B
238	Kabupaten Bolaang Mongondow	3,82	B
239	Kota Langsa	3,81	B
240	Kabupaten Serdang Bedagai	3,81	B
241	Kabupaten Kotawaringin Timur	3,81	B
242	Kabupaten Wonosobo	3,81	B
243	Kota Pangkalpinang	3,8	B
244	Kabupaten Kepahiang	3,79	B
245	Kabupaten Banggai	3,78	B
246	Kabupaten Lebong	3,77	B
247	Kabupaten Pamekasan	3,77	B
248	Kabupaten Sambas	3,77	B
249	Kabupaten Seluma	3,76	B
250	Kabupaten Subang	3,75	B
251	Kabupaten Bangli	3,75	B
252	Kabupaten Pringsewu	3,73	B

No	DPM-PTSP KAB/KOTA	Indeks	Kategori
253	Kabupaten Kutai Barat	3,73	B
254	Kabupaten Kaur	3,72	B
255	Kabupaten Bungo	3,72	B
256	Kota Cirebon	3,72	B
257	Kabupaten Nunukan	3,72	B
258	Kabupaten Ciamis	3,68	B
259	Kabupaten Indramayu	3,67	B
260	Kabupaten Soppeng	3,67	B
261	Kabupaten Muaro Jambi	3,66	B
262	Kabupaten Jember	3,66	B
263	Kabupaten Pangkajene Kepulauan	3,66	B
264	Kabupaten Rokan Hulu	3,65	B
265	Kabupaten Nias Barat	3,64	B
266	Kabupaten Cirebon	3,64	B
267	Kabupaten Bulungan	3,64	B
268	Kabupaten Pasangkayu	3,64	B
269	Kabupaten Luwu Utara	3,64	B
270	Kota Sabang	3,63	B
271	Kabupaten Rejang Lebong	3,63	B
272	Kabupaten Minahasa Utara	3,63	B
273	Kabupaten Bengkulu Utara	3,62	B
274	Kabupaten Boalemo	3,62	B
275	Kabupaten Lumajang	3,61	B
276	Kabupaten Pelalawan	3,6	B
277	Kabupaten Bone	3,6	B
278	Kabupaten Biak Numfor	3,6	B
279	Kabupaten Kepulauan Sula	3,59	B
280	Kabupaten Manggarai Timur	3,58	B

No	DPM-PTSP KAB/KOTA	Indeks	Kategori
281	Kota Kotamobagu	3,58	B
282	Kabupaten Nganjuk	3,57	B
283	Kabupaten Pidie Jaya	3,56	B
284	Kota Sungaipenuh	3,56	B
285	Kabupaten Balangan	3,56	B
286	Kabupaten Malinau	3,55	B
287	Kabupaten Yapen*	3,55	B
288	Kabupaten Langkat	3,54	B
289	Kabupaten Lima Puluh Kota	3,54	B
290	Kota Sorong	3,54	B
291	Kota Subulussalam	3,53	B
292	Kota Lhokseumawe	3,53	B
293	Kota Tidore	3,53	B
294	Kota Jayapura	3,53	B
295	Kabupaten Jayapura	3,53	B
296	Kota Padangsidempuan	3,52	B
297	Kabupaten Wakatobi	3,52	B
298	Kabupaten Bangkalan	3,52	B
299	Kabupaten Bengkalis	3,51	B
300	Kabupaten Musi Rawas Utara	3,51	B
301	Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan	3,51	B
302	Kabupaten Majene	3,51	B
303	Kabupaten Kolaka Utara	3,51	B
304	Kabupaten Dairi	3,5	B-
305	Kabupaten Kuantan Singingi	3,5	B-
306	Kabuapten Mesuji	3,5	B-
307	Kabupaten Bengkayang	3,5	B-
308	Kabupaten Minahasa Selatan	3,5	B-

No	DPM-PTSP KAB/KOTA	Indeks	Kategori
309	Kabupaten Halmahera Timur	3,5	B-
310	Kabupaten Nabire	3,5	B-
311	Kabupaten Tapanuli Utara	3,49	B-
312	Kabupaten Mukomuko	3,49	B-
313	Kabupaten Berau	3,49	B-
314	Kabupaten Buton Selatan	3,49	B-
315	Kota Tual	3,49	B-
316	Kabupaten Bener Meriah	3,48	B-
317	Kabupaten Pakpak Bharat	3,48	B-
318	Kabupaten Tanjung Jabung Timur	3,48	B-
319	Kabupaten Manggarai Barat	3,48	B-
320	Kabupaten Jenepono	3,48	B-
321	Kabupaten Sijunjung	3,47	B-
322	Kabupaten Rokan Hilir	3,47	B-
323	Kabupaten Mojokerto	3,47	B-
324	Kabupaten Pulau Morotai	3,47	B-
325	Kabupaten Sorong	3,47	B-
326	Kabupaten Nias	3,46	B-
327	Kabupaten Sumbawa Barat	3,46	B-
328	Kabupaten Mamuju Tengah	3,46	B-
329	Kabupaten Tebo	3,45	B-
330	Kota Pematang Siantar	3,44	B-
331	Kabupaten Bangka Selatan	3,44	B-
332	Kabupaten Halmahera Selatan	3,44	B-
333	Kabupaten Simeulue	3,43	B-
334	Kabupaten Kepulauan Mentawai	3,43	B-
335	Kabupaten Pasaman Barat	3,43	B-
336	Kabupaten Pesisir Selatan	3,43	B-

No	DPM-PTSP KAB/KOTA	Indeks	Kategori
337	Kabupaten Situbondo	3,43	B-
338	Kabupaten Landak	3,43	B-
339	Kabupaten Bima	3,43	B-
340	Kabupaten Aceh Tamiang	3,42	B-
341	Kabupaten Ogan Komering Ilir	3,42	B-
342	Kabupaten Pangandaran	3,41	B-
343	Kabupaten Pesisir Barat	3,41	B-
344	Kabupaten Ponorogo	3,41	B-
345	Kota Tanjungbalai	3,4	B-
346	Kabupaten Boven Digoel	3,4	B-
347	Kabupaten Kapuas Hulu	3,39	B-
348	Kota Gunungsitoli	3,38	B-
349	Kabupaten Luwu Timur	3,36	B-
350	Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir	3,35	B-
351	Kabupaten Buton Tengah	3,35	B-
352	Kabupaten Lampung Timur	3,33	B-
353	Kota Palangkaraya	3,32	B-
354	Kabupaten Lombok Utara	3,32	B-
355	Kabupaten Maluku Tengah	3,31	B-
356	Kabupaten Labuhan Batu	3,3	B-
357	Kabupaten Lamandau	3,3	B-
358	Kota Sibolga	3,28	B-
359	Kabupaten Kepulauan Sangihe	3,27	B-
360	Kabupaten Sumenep	3,25	B-
361	Kabupaten Penajam Paser Utara	3,25	B-
362	Kabupaten Katingan	3,25	B-
363	Kota Ambon	3,25	B-
364	Kabupaten Bulukumba	3,23	B-

No	DPM-PTSP KAB/KOTA	Indeks	Kategori
365	Kabupaten Fak-fak	3,23	B-
366	Kabupaten Belitung Timur	3,22	B-
367	Kabupaten Enrekang	3,22	B-
368	Kabupaten Tapanuli Selatan	3,21	B-
369	Kabupaten Raja Ampat	3,21	B-
370	Kabupaten Humbang Hasundutan	3,19	B-
371	Kabupaten Jayawijaya	3,19	B-
372	Kabupaten Teluk Wondama	3,19	B-
373	Kabupaten Toba Samosir	3,18	B-
374	Kabupaten Banggai Laut	3,17	B-
375	Kabupaten Asmat	3,17	B-
376	Kota Dumai	3,16	B-
377	Kabupaten Sarolangun	3,15	B-
378	Kabupaten Sukamara	3,15	B-
379	Kabupaten Lombok Tengah	3,15	B-
380	Kabupaten Konawe Kepulauan	3,15	B-
381	Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan	3,14	B-
382	Kabupaten Aceh Selatan	3,13	B-
383	Kabupaten Aceh Barat Daya	3,11	B-
384	Kabupaten Aceh Timur	3,11	B-
385	Kabupaten Padang Lawas	3,1	B-
386	Kabupaten Padang Lawas Utara	3,1	B-
387	Kabupaten Bengkulu Tengah	3,1	B-
388	Kabupaten Ngada	3,1	B-
389	Kabupaten Timor Tengah Utara	3,1	B-
390	Kabupaten Buru	3,1	B-
391	Kabupaten Bangka Barat	3,09	B-
392	Kabupaten Barito Utara	3,09	B-

No	DPM-PTSP KAB/KOTA	Indeks	Kategori
393	Kabupaten Buton Utara	3,09	B-
394	Kabupaten Samosir	3,08	B-
395	Kabupaten Manggarai	3,08	B-
396	Kabupaten Rembang	3,08	B-
397	Kabupaten Aceh Singkil	3,07	B-
398	Kabupaten Lombok Barat	3,05	B-
399	Kabupaten Gayo Lues	3,04	B-
400	Kota Pagar Alam	3,03	B-
401	Kabupaten Lahat	3,03	B-
402	Kota Kupang	3,02	B-
403	Kabupaten Flores Timur	3,02	B-
404	Kabupaten Toraja Utara	3,02	B-
405	Kabupaten Maluku Tenggara	3,02	B-
406	Kabupaten Nagan Raya	3,01	B-
407	Kabupaten Kepulauan Talaud	3,01	B-
408	Kabupaten Muna Barat	3	C
409	Kabupaten Belitung	2,99	C
410	Kota Serang	2,99	C
411	Kabupaten Kutai Timur	2,98	C
412	Kabupaten Aceh Jaya	2,97	C
413	Kabupaten Buton	2,96	C
414	Kabupaten Paser	2,95	C
415	Kabupaten Minahasa Tenggara	2,95	C
416	Kabupaten Bolaang Mongondow Utara	2,94	C
417	Kabupaten Kepulauan Meranti	2,93	C
418	Kabupaten Kolaka	2,92	C
419	Kabupaten Buol	2,9	C
420	Kabupaten Pidie	2,87	C

No	DPM-PTSP KAB/KOTA	Indeks	Kategori
421	Kabupaten Sumbawa	2,87	C
422	Kabupaten Lombok Timur	2,86	C
423	Kabupaten Konawe	2,86	C
424	Kabupaten Nias Utara	2,83	C
425	Kabupaten Morowali	2,81	C
426	Kabupaten Parigi Moutong	2,79	C
427	Kabupaten Kerinci	2,78	C
428	Kab, Konawe Utara	2,78	C
429	Kabupaten Labuhanbatu Selatan	2,77	C
430	Kabupaten Batu Bara	2,76	C
431	Kabupaten Halmahera Barat	2,76	C
432	Kabupaten Merangin	2,74	C
433	Kabupaten Banggai Kepulauan	2,74	C
434	Kabupaten Sidenreng Rappang	2,74	C
435	Kabupaten Hulu Sungai Utara	2,73	C
436	Kabupaten Aceh Tenggara	2,71	C
437	Kabupaten Mappi	2,71	C
438	Kabupaten Mandailing Natal	2,69	C
439	Kabupaten Barito Selatan	2,69	C
440	Kabupaten Morowali Utara	2,67	C
441	Kabupaten Wajo	2,67	C
442	Kab, Seram Bagian Timur	2,67	C
443	Kabupaten Melawi	2,66	C
444	Kabupaten Bolaang Mongondow Timur	2,66	C
445	Kabupaten Tana Toraja	2,66	C
446	Kab, Seram Bagian Barat	2,66	C
447	Kabupaten Maluku Barat Daya	2,64	C
448	Kabupaten Tapanuli Tengah	2,63	C

No	DPM-PTSP KAB/KOTA	Indeks	Kategori
449	Kabupaten Aceh Utara	2,62	C
450	Kabupaten Gunung Mas	2,62	C
451	Kabupaten Timor Tengah Selatan	2,6	C
452	Kabupaten Sarmi	2,6	C
453	Kabupaten Simalungun	2,59	C
454	Kabupaten Teluk Bintuni	2,58	C
455	Kabupaten Poso	2,57	C
456	Kabupaten Luwu	2,57	C
457	Kabupaten Kepulauan Aru	2,57	C
458	Kabupaten Kaimana	2,56	C
459	Kabupaten Mamasa	2,55	C
460	Kabupaten Kolaka Timur	2,55	C
461	Kabupaten Takalar	2,54	C
462	Kabupaten Minahasa	2,53	C
463	Kabupaten Tojo Unauna	2,53	C
464	Kabupaten Kupang	2,52	C
465	Kabupaten Halmahera Tengah	2,52	C
466	Kabupaten Kepulauan Sitaro	2,44	C-
467	Kabupaten Pulau Taliabu	2,43	C-
468	Kabupaten Labuhanbatu Utara	2,41	C-
469	Kota Binjai	2,39	C-
470	Kabupaten Nagekeo	2,34	C-
471	Kabupaten Mimika	2,33	C-
472	Kabupaten Supiori	2,3	C-
473	Kabupaten Muna	2,29	C-
474	Kabupaten Donggala	2,28	C-
475	Kabupaten Sumba Barat Daya	2,26	C-
476	Kabupaten Tolitoli	2,23	C-

No	DPM-PTSP KAB/KOTA	Indeks	Kategori
477	Kabupaten Barito Timur	2,2	C-
478	Kabupaten Manokwari Selatan	2,15	C-
479	Kabupaten Ende	2,14	C-
480	Kabupaten Sumba Timur	2,14	C-
481	Kabupaten Nias Selatan	2,11	C-
482	Kabupaten Mamberamo Raya	2,1	C-
483	Kabupaten Sumba Barat	2,09	C-
484	Kabupaten Tanimbar	2,07	C-
485	Kabupaten Tana Tidung	2,06	C-
486	Kabupaten Rote Ndao	2,06	C-
487	Kabupaten Sabu Raijua	2,05	C-
488	Kabupaten Buru Selatan	2,05	C-
489	Kabupaten Yahukimo	2,01	C-
490	Kabupaten Sigi	1,88	D
491	Kabupaten Tolikara	1,82	D
492	Kabupaten Sorong Selatan	1,76	D
493	Kabupaten Tambrauw	1,69	D
494	Kabupaten Mahakam Ulu	1,55	D
495	Kabupaten Malaka	1,51	D
496	Kabupaten Sumba Tengah	1,51	D
497	Kabupaten Sikka	-	NA
498	Kabupaten Lembata	-	NA
499	Kabupaten Alor	-	NA
500	Kabupaten Paniai	-	NA
501	Kabupaten Puncak Jaya	-	NA
502	Kabupaten Keerom	-	NA
503	Kabupaten Pegunungan Bintang	-	NA
504	Kabupaten Waropen	-	NA

No	DPM-PTSP KAB/KOTA	Indeks	Kategori
505	Kabupaten Mamberamo Tengah	-	NA
506	Kabupaten Yalimo	-	NA
507	Kabupaten Lanny Jaya	-	NA
508	Kabupaten Nduga	-	NA
509	Kabupaten Puncak	-	NA
510	Kabupaten Dogiyai	-	NA
511	Kabupaten Intan Jaya	-	NA
512	Kabupaten Deiyai	-	NA
513	Kabupaten Maybrat	-	NA
514	Kabupaten Pegunungan Arfak	-	NA

F. DISDUKCAPIL KABUPATEN/KOTA

No	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	Indeks	Kategori
1	Kabupaten Badung	4,76	A
2	Kabupaten Bantul	4,75	A
3	Kabupaten Padang Pariaman	4,74	A
4	Kabupaten Banyumas	4,72	A
5	Kota Administrasi Jakarta Selatan	4,68	A
6	Kota Denpasar	4,68	A
7	Kabupaten Banyuwangi	4,67	A
8	Kota Surakarta	4,67	A
9	Kota Tebing Tinggi	4,66	A
10	Kota Samarinda	4,65	A
11	Kabupaten Sleman	4,64	A
12	Kota Metro	4,61	A
13	Kabupaten Tulang Bawang	4,6	A
14	Kabupaten Madiun	4,59	A
15	Kabupaten Sumedang	4,59	A

No	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	Indeks	Kategori
16	Kabupaten Grobogan	4,58	A
17	Kota Bandar Lampung	4,58	A
18	Kabupaten Kulonprogo	4,57	A
19	Kabupaten Karanganyar	4,57	A
20	Kota Banda Aceh	4,56	A
21	Kota Pekanbaru	4,55	A
22	Kota Bandung	4,55	A
23	Kota Surabaya	4,54	A
24	Kota Banjarbaru	4,54	A
25	Kabupaten Tapin	4,54	A
26	Kabupaten Tanah Laut	4,54	A
27	Kabupaten Jepara	4,53	A
28	Kota Semarang	4,53	A
29	Kabupaten Cilacap	4,53	A
30	Kabupaten Gunung Kidul	4,53	A
31	Kota Payakumbuh	4,53	A
32	Kota Palembang	4,52	A
33	Kabupaten Banyuasin	4,52	A
34	Kota Banjarmasin	4,52	A
35	Kabupaten Tabalong	4,52	A
36	Kota Yogyakarta	4,52	A
37	Kota Malang	4,52	A
38	Kota Mojokerto	4,51	A
39	Kabupaten Magetan	4,51	A
40	Kota Magelang	4,51	A
41	Kabupaten Bone Bolango	4,51	A
42	Kota Medan	4,5	A-
43	Kota Administrasi Jakarta Timur	4,5	A-

No	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	Indeks	Kategori
44	Kabupaten Kapuas	4,5	A-
45	Kota Solok	4,49	A-
46	Kabupaten Tulungagung	4,49	A-
47	Kabupaten Klungkung	4,49	A-
48	Kabupaten Aceh Tengah	4,47	A-
49	Kabupaten Sidoarjo	4,47	A-
50	Kabupaten Hulu Sungai Selatan	4,47	A-
51	Kabupaten Kendal	4,47	A-
52	Kabupaten Tanah Datar	4,46	A-
53	Kota Administrasi Jakarta Pusat	4,46	A-
54	Kabupaten Kutai Kartanegara	4,46	A-
55	Kota Administrasi Jakarta Barat	4,45	A-
56	Kabupaten Purbalingga	4,45	A-
57	Kabupaten Pasuruan	4,44	A-
58	Kabupaten Bangka Tengah	4,43	A-
59	Kabupaten Bangka	4,43	A-
60	Kota Jayapura	4,43	A-
61	Kabupaten Solok	4,41	A-
62	Kabupaten Sanggau	4,41	A-
63	Kota Pare-Pare	4,41	A-
64	Kota Tegal	4,4	A-
65	Kota Depok	4,39	A-
66	Kabupaten Kudus	4,39	A-
67	Kabupaten Wonogiri	4,39	A-
68	Kabupaten Sijunjung	4,37	A-
69	Kota Tangerang Selatan	4,37	A-
70	Kota Madiun	4,37	A-
71	Kota Balikpapan	4,36	A-

No	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	Indeks	Kategori
72	Kabupaten Hulu Sungai Tengah	4,36	A-
73	Kota Bekasi	4,35	A-
74	Kabupaten Karangasem	4,35	A-
75	Kabupaten Temanggung	4,35	A-
76	Kabupaten Gorontalo	4,35	A-
77	Kabupaten Boalemo	4,35	A-
78	Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir	4,34	A-
79	Kabupaten Probolinggo	4,34	A-
80	Kota Probolinggo	4,34	A-
81	Kabupaten Tanah Bumbu	4,34	A-
82	Kota Tangerang	4,33	A-
83	Kabupaten Banjar	4,33	A-
84	Kabupaten Semarang	4,33	A-
85	Kabupaten Tangerang	4,32	A-
86	Kabupaten Tasikmalaya	4,32	A-
87	Kota Blitar	4,32	A-
88	Kabupaten Kotawaringin Barat	4,32	A-
89	Kota Padang Panjang	4,31	A-
90	Kota Batu	4,31	A-
91	Kabupaten Buleleng	4,31	A-
92	Kabupaten Klaten	4,31	A-
93	Kabupaten Ogan Komering Ilir	4,3	A-
94	Kota Bogor	4,3	A-
95	Kabupaten Tanggamus	4,3	A-
96	Kota Administrasi Jakarta Utara	4,3	A-
97	Kota Salatiga	4,3	A-
98	Kota Pariaman	4,29	A-
99	Kabupaten Pasaman	4,29	A-

No	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	Indeks	Kategori
100	Kota Palu	4,29	A-
101	Kota Cilegon	4,28	A-
102	Kabupaten Tuban	4,28	A-
103	Kabupaten Sukoharjo	4,28	A-
104	Kabupaten Garut	4,27	A-
105	Kota Pasuruan	4,26	A-
106	Kabupaten Kolaka Utara	4,26	A-
107	Kabupaten Pulau Morotai	4,26	A-
108	Kabupaten Musi Banyuasin	4,25	A-
109	Kota Sukabumi	4,24	A-
110	Kabupaten Seruyan	4,24	A-
111	Kabupaten Muara Enim	4,23	A-
112	Kabupaten Pekalongan	4,23	A-
113	Kabupaten Gianyar	4,22	A-
114	Kabupaten Lampung Selatan	4,2	A-
115	Kota Tanjungpinang	4,19	A-
116	Kabupaten Majalengka	4,19	A-
117	Kabupaten Purworejo	4,19	A-
118	Kabupaten Kebumen	4,19	A-
119	Kabupaten Kediri	4,18	A-
120	Kabupaten Kubu Raya	4,18	A-
121	Kota Pontianak	4,16	A-
122	Kota Pangkalpinang	4,15	A-
123	Kabupaten Bojonegoro	4,15	A-
124	Kabupaten Banjarnegara	4,15	A-
125	Kabupaten Pinrang	4,15	A-
126	Kabupaten Belitung	4,14	A-
127	Kabupaten Pati	4,14	A-

No	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	Indeks	Kategori
128	Kota Lubuklinggau	4,13	A-
129	Kabupaten Bogor	4,11	A-
130	Kabupaten Malang	4,11	A-
131	Kota Cimahi	4,1	A-
132	Kabupaten Langkat	4,1	A-
133	Kabupaten Sukabumi	4,1	A-
134	Kabupaten Jember	4,09	A-
135	Kota Bontang	4,09	A-
136	Kota Banjar	4,08	A-
137	Kabupaten Lampung Utara	4,06	A-
138	Kabupaten Hulu Sungai Utara	4,06	A-
139	Kota Makassar	4,05	A-
140	Kabupaten Lombok Timur	4,04	A-
141	Kota Ternate	4,04	A-
142	Kabupaten Deli Serdang	4,03	A-
143	Kota Bukittinggi	4,03	A-
144	Kabupaten Bandung Barat	4,03	A-
145	Kabupaten Subang	4,03	A-
146	Kabupaten Ketapang	4,03	A-
147	Kabupaten Lombok Barat	4,03	A-
148	Kabupaten Halmahera Utara	4,03	A-
149	Kabupaten Demak	4,02	A-
150	Kabupaten Bintan	4,01	A-
151	Kota Prabumulih	4,01	A-
152	Kabupaten Ogan Ilir	4,01	A-
153	Kabupaten Musi Rawas	4,01	A-
154	Kota Mataram	4,01	A-
155	Kabupaten Belu	4,01	A-

No	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	Indeks	Kategori
156	Kabupaten Aceh Barat	4	B
157	Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur	4	B
158	Kabupaten Karawang	4	B
159	Kabupaten Lumajang	4	B
160	Kabupaten Banggai	4	B
161	Kabupaten Maros	4	B
162	Kabupaten Soppeng	4	B
163	Kabupaten Kepulauan Sula	4	B
164	Kabupaten Agam	3,99	B
165	Kota Serang	3,99	B
166	Kabupaten Natuna	3,98	B
167	Kabupaten Bandung	3,98	B
168	Kabupaten Kotabaru	3,98	B
169	Kabupaten Blora	3,98	B
170	Kabupaten Bengkalis	3,97	B
171	Kabupaten Lampung Barat	3,97	B
172	Kabupaten Tulang Bawang Barat	3,97	B
173	Kabupaten Barito Kuala	3,97	B
174	Kabupaten Magelang	3,97	B
175	Kabupaten Dharmasraya	3,95	B
176	Kota Pekalongan	3,95	B
177	Kabupaten Tegal	3,95	B
178	Kabupaten Serang	3,94	B
179	Kabupaten Way Kanan	3,94	B
180	Kabupaten Berau	3,94	B
181	Kabupaten Batang	3,94	B
182	Kota Palopo	3,94	B
183	Kabupaten Bulukumba	3,93	B

No	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	Indeks	Kategori
184	Kota Padang	3,92	B
185	Kabupaten Pidie Jaya	3,91	B
186	Kabupaten Pasaman Barat	3,91	B
187	Kabupaten Seluma	3,91	B
188	Kabupaten Tabanan	3,91	B
189	Kabupaten Lingga	3,9	B
190	Kota Singkawang	3,9	B
191	Kabupaten Sumbawa Barat	3,9	B
192	Kota Sawahlunto	3,89	B
193	Kabupaten Bangka Selatan	3,89	B
194	Kabupaten Lamongan	3,89	B
195	Kota Bima	3,89	B
196	Kabupaten Pematang	3,89	B
197	Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu	3,88	B
198	Kabupaten Brebes	3,88	B
199	Kota Jambi	3,87	B
200	Kabupaten Gowa	3,87	B
201	Kabupaten Bombana	3,87	B
202	Kota Tomohon	3,86	B
203	Kabupaten Bengkulu Selatan	3,85	B
204	Kabupaten Ponorogo	3,85	B
205	Kota Tasikmalaya	3,83	B
206	Kabupaten Lampung Timur	3,83	B
207	Kabupaten Sinjai	3,83	B
208	Kabupaten Sampang	3,81	B
209	Kabupaten Mempawah	3,81	B
210	Kabupaten Empat Lawang	3,8	B
211	Kabupaten Gresik	3,8	B

No	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	Indeks	Kategori
212	Kabupaten Boyolali	3,8	B
213	Kota Kotamobagu	3,8	B
214	Kabupaten Dairi	3,79	B
215	Kota Manado	3,79	B
216	Kabupaten Jombang	3,78	B
217	Kabupaten Sumenep	3,78	B
218	Kota Gorontalo	3,78	B
219	Kota Bengkulu	3,77	B
220	Kabupaten Merangin	3,77	B
221	Kabupaten Bolaang Mongondow	3,77	B
222	Kabupaten Kaur	3,75	B
223	Kabupaten Bekasi	3,75	B
224	Kota Bitung	3,73	B
225	Kabupaten Kepulauan Sangihe	3,73	B
226	Kabupaten Serdang Bedagai	3,72	B
227	Kabupaten Karimun	3,72	B
228	Kabupaten Pandeglang	3,71	B
229	Kabupaten Cirebon	3,71	B
230	Kota Langsa	3,69	B
231	Kabupaten Bener Meriah	3,69	B
232	Kota Tanjungbalai	3,69	B
233	Kabupaten Ogan Komering Ulu	3,68	B
234	Kabupaten Tojo Unauna	3,68	B
235	Kota Kendari	3,68	B
236	Kabuapten Mesuji	3,67	B
237	Kabupaten Kayong Utara	3,67	B
238	Kabupaten Lebong	3,66	B
239	Kabupaten Musi Rawas Utara	3,66	B

No	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	Indeks	Kategori
240	Kabupaten Sragen	3,66	B
241	Kota Sabang	3,65	B
242	Kabupaten Indramayu	3,65	B
243	Kabupaten Sintang	3,65	B
244	Kabupaten Halmahera Selatan	3,65	B
245	Kabupaten Lampung Tengah	3,64	B
246	Kabupaten Takalar	3,64	B
247	Kabupaten Kolaka Timur	3,64	B
248	Kabupaten Bireuen	3,63	B
249	Kabupaten Lebak	3,63	B
250	Kabupaten Situbondo	3,63	B
251	Kabupaten Landak	3,63	B
252	Kabupaten Cianjur	3,62	B
253	Kabupaten Lamandau	3,62	B
254	Kota Batam	3,61	B
255	Kabupaten Rejang Lebong	3,61	B
256	Kabupaten Purwakarta	3,61	B
257	Kabupaten Kapuas Hulu	3,6	B
258	Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan	3,59	B
259	Kabupaten Sorong	3,59	B
260	Kabupaten Kepulauan Anambas	3,58	B
261	Kabupaten Pacitan	3,56	B
262	Kabupaten Gorontalo Utara	3,56	B
263	Kabupaten Morowali Utara	3,56	B
264	Kabupaten Luwu Utara	3,56	B
265	Kota Tarakan	3,55	B
266	Kabupaten Manggarai Barat	3,55	B
267	Kabupaten Wonosobo	3,55	B

No	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	Indeks	Kategori
268	Kota Tidore	3,55	B
269	Kabupaten Sumba Timur	3,54	B
270	Kabupaten Asahan	3,53	B
271	Kabupaten Kepahiang	3,53	B
272	Kabupaten Pangkajene Kepulauan	3,53	B
273	Kabupaten Aceh Jaya	3,52	B
274	Kabupaten Aceh Tamiang	3,52	B
275	Kabupaten Aceh Singkil	3,52	B
276	Kabupaten Ende	3,52	B
277	Kabupaten Bantaeng	3,52	B
278	Kota Subulussalam	3,51	B
279	Kabupaten Aceh Besar	3,51	B
280	Kabupaten Majene	3,51	B
281	Kabupaten Siak	3,5	B-
282	Kabupaten Belitung Timur	3,5	B-
283	Kabupaten Lombok Utara	3,5	B-
284	Kabupaten Tapanuli Utara	3,49	B-
285	Kabupaten Kepulauan Mentawai	3,49	B-
286	Kabupaten Mukomuko	3,49	B-
287	Kota Sungaipenuh	3,49	B-
288	Kabupaten Pringsewu	3,49	B-
289	Kabupaten Katingan	3,49	B-
290	Kabupaten Dompu	3,49	B-
291	Kabupaten Mamuju Tengah	3,49	B-
292	Kabupaten Toraja Utara	3,49	B-
293	Kabupaten Halmahera Tengah	3,49	B-
294	Kabupaten Solok Selatan	3,48	B-
295	Kabupaten Kuningan	3,47	B-

No	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	Indeks	Kategori
296	Kabupaten Balangan	3,47	B-
297	Kabupaten Rembang	3,46	B-
298	Kabupaten Mamuju	3,46	B-
299	Kabupaten Buru	3,46	B-
300	Kabupaten Nias	3,45	B-
301	Kabupaten Pakpak Bharat	3,45	B-
302	Kabupaten Bengkulu Utara	3,45	B-
303	Kabupaten Trenggalek	3,45	B-
304	Kabupaten Pamekasan	3,45	B-
305	Kabupaten Sidenreng Rappang	3,45	B-
306	Kota Baubau	3,45	B-
307	Kabupaten Bengkulu Tengah	3,44	B-
308	Kabupaten Tebo	3,44	B-
309	Kabupaten Sukamara	3,44	B-
310	Kabupaten Bima	3,44	B-
311	Kabupaten Barru	3,44	B-
312	Kabupaten Pangandaran	3,43	B-
313	Kota Tual	3,43	B-
314	Kabupaten Fak-fak	3,43	B-
315	Kabupaten Pesisir Selatan	3,42	B-
316	Kabupaten Sarolangun	3,42	B-
317	Kabupaten Tanjung Jabung Barat	3,42	B-
318	Kabupaten Barito Utara	3,42	B-
319	Kabupaten Bangli	3,42	B-
320	Kabupaten Pulang Pisau	3,41	B-
321	Kabupaten Sumbawa	3,41	B-
322	Kabupaten Bondowoso	3,4	B-
323	Kabupaten Kutai Barat	3,4	B-

No	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	Indeks	Kategori
324	Kabupaten Bone	3,38	B-
325	Kabupaten Pasangkayu	3,37	B-
326	Kabupaten Kotawaringin Timur	3,35	B-
327	Kabupaten Pohuwato	3,35	B-
328	Kabupaten Paser	3,34	B-
329	Kabupaten Merauke	3,34	B-
330	Kabupaten Penajam Paser Utara	3,33	B-
331	Kabupaten Polewali Mandar	3,33	B-
332	Kabupaten Manokwari	3,32	B-
333	Kota Padangsidempuan	3,3	B-
334	Kabupaten Lahat	3,3	B-
335	Kabupaten Kaimana	3,29	B-
336	Kabupaten Batanghari	3,28	B-
337	Kota Kediri	3,28	B-
338	Kabupaten Sambas	3,28	B-
339	Kabupaten Lombok Tengah	3,27	B-
340	Kabupaten Kepulauan Meranti	3,26	B-
341	Kabupaten Minahasa Utara	3,26	B-
342	Kabupaten Maluku Tenggara	3,26	B-
343	Kabupaten Jembrana	3,25	B-
344	Kabupaten Manggarai Timur	3,25	B-
345	Kabupaten Lima Puluh Kota	3,24	B-
346	Kabupaten Wakatobi	3,24	B-
347	Kabupaten Aceh Barat Daya	3,23	B-
348	Kabupaten Blitar	3,23	B-
349	Kabupaten Toba Samosir	3,22	B-
350	Kabupaten Mappi	3,22	B-
351	Kabupaten Kampar	3,21	B-

No	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	Indeks	Kategori
352	Kabupaten Muaro Jambi	3,21	B-
353	Kabupaten Minahasa	3,19	B-
354	Kabupaten Konawe Selatan	3,19	B-
355	Kabupaten Tana Tidung	3,18	B-
356	Kota Pematang Siantar	3,17	B-
357	Kabupaten Morowali	3,16	B-
358	Kabupaten Mojokerto	3,15	B-
359	Kabupaten Raja Ampat	3,15	B-
360	Kabupaten Mamasa	3,14	B-
361	Kabupaten Luwu Timur	3,14	B-
362	Kabupaten Teluk Bintuni	3,14	B-
363	Kota Lhokseumawe	3,13	B-
364	Kabupaten Tanjung Jabung Timur	3,13	B-
365	Kota Cirebon	3,13	B-
366	Kabupaten Ngawi	3,13	B-
367	Kabupaten Bangkalan	3,13	B-
368	Kabupaten Nunukan	3,13	B-
369	Kota Palangkaraya	3,12	B-
370	Kota Ambon	3,12	B-
371	Kabupaten Aceh Utara	3,11	B-
372	Kabupaten Sekadau	3,11	B-
373	Kabupaten Buton	3,11	B-
374	Kabupaten Labuhan Batu	3,1	B-
375	Kabupaten Padang Lawas Utara	3,1	B-
376	Kabupaten Bungo	3,1	B-
377	Kabupaten Poso	3,1	B-
378	Kabupaten Yapen*	3,1	B-
379	Kota Sorong	3,1	B-

No	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	Indeks	Kategori
380	Kota Pagar Alam	3,09	B-
381	Kabupaten Halmahera Timur	3,09	B-
382	Kabupaten Bangka Barat	3,07	B-
383	Kabupaten Kolaka	3,07	B-
384	Kabupaten Karo	3,06	B-
385	Kabupaten Labuhanbatu Selatan	3,06	B-
386	Kabupaten Nganjuk	3,06	B-
387	Kabupaten Pesawaran	3,05	B-
388	Kabupaten Wajo	3,05	B-
389	Kab, Konawe Utara	3,05	B-
390	Kabupaten Simeulue	3,04	B-
391	Kabupaten Padang Lawas	3,03	B-
392	Kabupaten Aceh Selatan	3,02	B-
393	Kabupaten Indragiri Hulu	3,01	B-
394	Kabupaten Timor Tengah Utara	3,01	B-
395	Kabupaten Biak Numfor	3,01	B-
396	Kabupaten Kerinci	3	C
397	Kabupaten Murung Raya	2,99	C
398	Kabupaten Malinau	2,99	C
399	Kabupaten Kepulauan Sitaro	2,98	C
400	Kabupaten Labuhanbatu Utara	2,97	C
401	Kabupaten Konawe	2,97	C
402	Kabupaten Konawe Kepulauan	2,97	C
403	Kabupaten Aceh Tenggara	2,96	C
404	Kabupaten Humbang Hasundutan	2,96	C
405	Kabupaten Ciamis	2,95	C
406	Kabupaten Halmahera Barat	2,94	C
407	Kabupaten Kuantan Singingi	2,93	C

No	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	Indeks	Kategori
408	Kabupaten Bengkayang	2,91	C
409	Kabupaten Minahasa Selatan	2,91	C
410	Kabupaten Minahasa Tenggara	2,89	C
411	Kabupaten Bolaang Mongondow Utara	2,88	C
412	Kota Binjai	2,87	C
413	Kabupaten Rokan Hulu	2,85	C
414	Kabupaten Barito Timur	2,84	C
415	Kabupaten Paniai	2,83	C
416	Kab, Seram Bagian Barat	2,82	C
417	Kabupaten Tanimbar	2,81	C
418	Kabupaten Gunung Mas	2,79	C
419	Kabupaten Pulau Taliabu	2,79	C
420	Kabupaten Tapanuli Selatan	2,78	C
421	Kabupaten Gayo Lues	2,75	C
422	Kabupaten Bulungan	2,75	C
423	Kabupaten Banggai Laut	2,74	C
424	Kabupaten Bolaang Mongondow Timur	2,71	C
425	Kabupaten Samosir	2,7	C
426	Kabupaten Batu Bara	2,7	C
427	Kab, Seram Bagian Timur	2,69	C
428	Kabupaten Alor	2,68	C
429	Kabupaten Buol	2,68	C
430	Kota Dumai	2,67	C
431	Kabupaten Maluku Barat Daya	2,67	C
432	Kabupaten Pidie	2,66	C
433	Kabupaten Simalungun	2,66	C
434	Kota Kupang	2,66	C
435	Kabupaten Indragiri Hilir	2,64	C

No	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	Indeks	Kategori
436	Kabupaten Nagekeo	2,62	C
437	Kabupaten Pelalawan	2,6	C
438	Kabupaten Jenepono	2,6	C
439	Kabupaten Aceh Timur	2,57	C
440	Kota Sibolga	2,55	C
441	Kabupaten Manggarai	2,55	C
442	Kabupaten Rote Ndao	2,54	C
443	Kabupaten Kepulauan Selayar	2,54	C
444	Kabupaten Buton Selatan	2,54	C
445	Kabupaten Jayapura	2,54	C
446	Kabupaten Flores Timur	2,53	C
447	Kabupaten Maluku Tengah	2,53	C
448	Kabupaten Mandailing Natal	2,52	C
449	Kabupaten Pesisir Barat	2,52	C
450	Kabupaten Kupang	2,52	C
451	Kabupaten Sabu Raijua	2,52	C
452	Kabupaten Tapanuli Tengah	2,51	C
453	Kabupaten Rokan Hilir	2,51	C
454	Kabupaten Mimika	2,51	C
455	Kabupaten Tolitoli	2,5	C-
456	Kabupaten Banggai Kepulauan	2,49	C-
457	Kabupaten Asmat	2,49	C-
458	Kabupaten Buru Selatan	2,47	C-
459	Kabupaten Supiori	2,4	C-
460	Kabupaten Sarmi	2,38	C-
461	Kota Gunungsitoli	2,37	C-
462	Kabupaten Tambrau	2,35	C-
463	Kabupaten Nias Utara	2,34	C-

No	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	Indeks	Kategori
464	Kabupaten Sorong Selatan	2,31	C-
465	Kabupaten Tana Toraja	2,3	C-
466	Kabupaten Nabire	2,3	C-
467	Kabupaten Mamberamo Raya	2,3	C-
468	Kabupaten Buton Utara	2,27	C-
469	Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan	2,25	C-
470	Kabupaten Muna Barat	2,25	C-
471	Kabupaten Parigi Moutong	2,21	C-
472	Kabupaten Nias Selatan	2,16	C-
473	Kabupaten Kepulauan Talaud	2,16	C-
474	Kabupaten Buton Tengah	2,15	C-
475	Kabupaten Teluk Wondama	2,15	C-
476	Kabupaten Melawi	2,14	C-
477	Kabupaten Sigi	2,1	C-
478	Kabupaten Enrekang	2,06	C-
479	Kabupaten Muna	2,06	C-
480	Kabupaten Jayawijaya	2,04	C-
481	Kabupaten Manokwari Selatan	2,04	C-
482	Kabupaten Nagan Raya	2,03	C-
483	Kabupaten Barito Selatan	2,03	C-
484	Kabupaten Sumba Barat Daya	2,03	C-
485	Kabupaten Kepulauan Aru	2,03	C-
486	Kabupaten Donggala	2,01	C-
487	Kabupaten Waropen	2,01	C-
488	Kabupaten Nias Barat	1,99	D
489	Kabupaten Yahukimo	1,98	D
490	Kabupaten Kutai Timur	1,97	D
491	Kabupaten Puncak	1,94	D

No	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	Indeks	Kategori
492	Kabupaten Intan Jaya	1,94	D
493	Kabupaten Sumba Barat	1,9	D
494	Kabupaten Pegunungan Bintang	1,86	D
495	Kabupaten Dogiyai	1,81	D
496	Kabupaten Timor Tengah Selatan	1,78	D
497	Kabupaten Yalimo	1,75	D
498	Kabupaten Luwu	1,73	D
499	Kabupaten Sumba Tengah	1,7	D
500	Kabupaten Tolikara	1,68	D
501	Kabupaten Mahakam Ulu	1,59	D
502	Kabupaten Ngada	1,53	D
503	Kabupaten Malaka	1,51	D
504	Kabupaten Sikka	-	NA
505	Kabupaten Lembata	-	NA
506	Kabupaten Puncak Jaya	-	NA
507	Kabupaten Boven Digoel	-	NA
508	Kabupaten Keerom	-	NA
509	Kabupaten Mamberamo Tengah	-	NA
510	Kabupaten Lanny Jaya	-	NA
511	Kabupaten Nduga	-	NA
512	Kabupaten Deiyai	-	NA
513	Kabupaten Maybrat	-	NA
514	Kabupaten Pegunungan Arfak	-	NA

MENTERI PENDAYAGUNAAN APARATUR
 NEGARA DAN REFORMASI BIROKRASI
 REPUBLIK INDONESIA,

ttd

ABDULLAH AZWAR ANAS